

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian yang dianut di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana kegiatan usahanya dilakukan oleh rakyat secara swadaya. Dengan mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Di dalam sistem ekonomi kerakyatan dikenal tiga pelaku ekonomi yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiga pelaku ekonomi diharapkan bisa menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di Indonesia.

Koperasi pun diharapkan dapat menjadi wadah bagi perkembangan perekonomian Indonesia, itu berarti bahwa kegiatan ekonomi koperasi pada umumnya harus bertujuan memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Peran koperasi menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Koperasi harus bisa menjadi soko guru perekonomian yang artinya adalah sebagai penyangga dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Barat berada di urutan ketiga dalam kontribusi terhadap perkembangan koperasi di Indonesia yakni 12,13% dari jumlah koperasi Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Tercatat ada

25.741 unit koperasi, jumlah ini meningkat 0,7% dari tahun 2014, sedangkan jumlah koperasi aktif adalah 16.855 unit dan 8.886 unit koperasi pasif. Salah satu koperasi di Jawa Barat yang masih aktif adalah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.

Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan merupakan koperasi primer yang cukup besar dan berada di Kabupaten Bandung. KPBS Pangalengan adalah koperasi produsen dimana anggotanya merupakan peternak yang berdomisili di daerah Bandung Selatan khususnya Pangalengan dengan jumlah anggota mencapai 4.556 orang per tahun buku 2017. Dalam melayani kebutuhan anggotanya, KPBS Pangalengan mendirikan unit usaha yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Produksi
2. Unit Pelayanan Barang Pakan dan Hijauan Makanan Ternak
3. Unit Kendaraan
4. Unit Pengelolaan Pakan
5. Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pembibitan
6. Unit Pelayanan Kesehatan Anggota
7. Unit usaha Pengolahan Susu
8. Unit Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandung Kidul

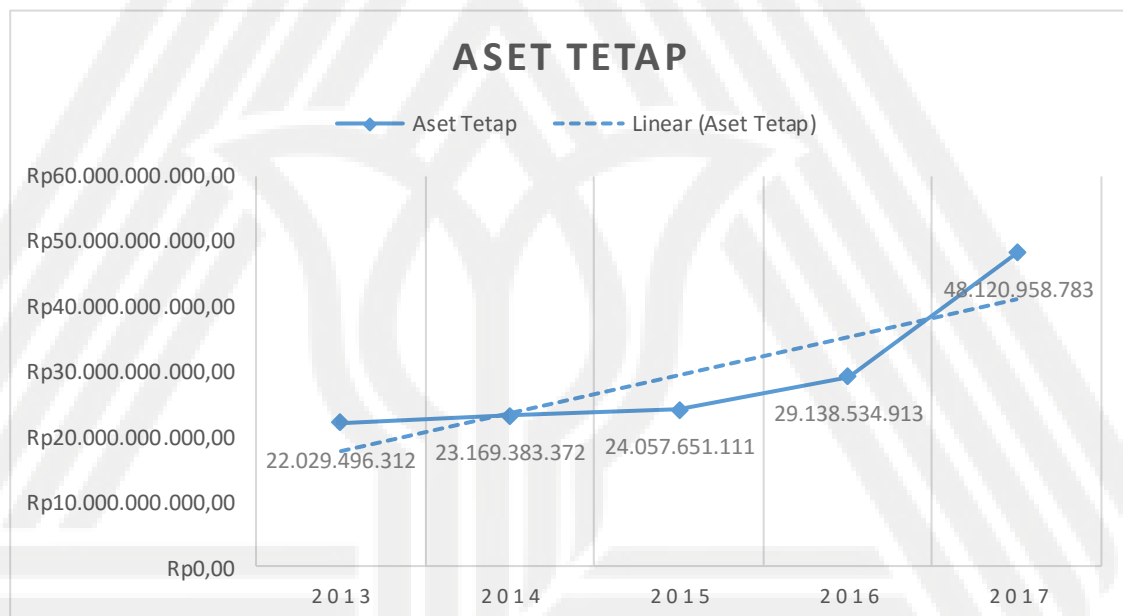
Susu merupakan produk utama yang menjadi usaha pokok KPBS Pangalengan. Oleh sebab itu pengelolaannya harus diperhatikan sebab Susu merupakan bahan baku yang mudah rusak di udara terbuka. Koperasi harus memperhitungkan cara menjaga kondisi susu agar tetap dalam kondisi baik

dengan mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu pengontrolan mesin-mesin penampungan susu harus dikelola dengan baik dan tetap dalam keadaan steril, selain itu kendaraan yang digunakan untuk pendistribusian juga harus dikelola agar proses pendistribusian bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan hal yang bisa menghambat proses pendistribusian akibat adanya peningkatan jumlah bakteri atau rusaknya kualitas susu yang menyebabkan susu sapi perah tersebut tidak bisa diolah, hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi anggota dan koperasi. Maka dari itu, Aset menjadi komponen penting dalam menjalankan setiap jenis usaha. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usahanya. Aset terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, aset lain-lain.

Aset yang menjadi penunjang dalam keberlangsungan usaha KPBS Pangalengan salah satunya adalah aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud dan tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan tujuan bukan untuk dijual kembali karena merupakan kekayaan yang berguna untuk menunjang keberlangsungan kegiatan usaha. Keberadaan aset tetap harus dikelola secara optimal agar memperoleh manfaat yang optimal dari hasil pengelolaannya. Aset tetap berwujud dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan dan lain-lain. Sedangkan aset tetap tidak berwujud berupa hak paten, hak cipta, hak merek dan sebagainya.

Aset tetap yang dimiliki KPBS Pangalengan antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan peralatan. Pengelolaan aset tetap yang baik bisa

menunjang pengembangan usaha yang optimal pada koperasi. Hal itu menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi koperasi untuk meningkatkan daya saingnya. Maka dari itu diperlukan manajemen aset untuk mengatur sumber dayanya termasuk mengoptimalkan dan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki KPBS Pangalengan. Perkembangan aset tetap Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS Pangalengan) dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Aset Tetap KPBS Pangalengan

Sumber : Laporan RAT KPBS Pangalengan 2013 - 2017

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa aset tetap KPBS Pangalengan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun buku 2016 ke tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp.18.982.423.869,85 atau jika di presentasikan adalah sebesar 65%.

Tabel 1.1 Perhitungan Debt To Total Assets, Total Asset Turnover, dan Return On Assets KPBS Pangalengan Tahun 2013 – 2016 berdasarkan Permen KUKM RI No.06/Per/M.KUMKM/V/2006 tentang Pedoman Koperasi Berprestasi untuk semua Unit Usaha

Tahun	Debt To Total Assets	Total Asset Turnover	Return On Assets
2013	67,4%	2,69 Kali	1,50%
2014	69,8%	2,49 Kali	1,46%
2015	71,7%	2,48 Kali	1,37%
2016	73,7%	2,34 Kali	1,33%
2017	67,30%	2,03 Kali	1,19%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 *Debt to total assets* adalah sebesar 67,3% artinya, setiap Rp.100,- pendanaan koperasi, Rp. 67,3,- dibiayai dengan liabilitas dan Rp. 32,7,- disediakan oleh modal sendiri dan termasuk ke dalam kategori kurang baik. Kondisi ini menunjukkan koperasi lebih dari separuhnya dibiayai oleh utang. Berdasarkan *Total Assets Turn Over* atau perputaran total aset tahun 2017 sebanyak 2,03 kali. Artinya, setiap Rp. 1,- total aset dapat menghasilkan Rp. 2,03,- penjualan dan termasuk ke dalam kategori cukup baik. Pada saat kondisi seperti ini, KPBS Pangalengan belum mampu memaksimalkan aset yang dimiliki. Koperasi diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aset yang kurang produktif, sedangkan *Return On Assets* KPBS Pangalengan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,19 %, artinya untuk setiap Rp. 1,- Aset yang digunakan KPBS Pangalengan mampu menghasilkan Rp.0,0119 laba bersih dan termasuk ke dalam kategori kurang baik.

Untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam optimalisasi aset tetap sebagai penunjang keberlangsungan usahanya haruslah dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Salah satu metode yang digunakan untuk mengelola aset tetap adalah dengan menerapkan manajemen aset pada koperasi. Banyak perusahaan yang masih menganggap manajemen aset secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset seperti definisi manajemen aset menurut Gima A. Sugiama (2013:15).

Pernyataan tersebut didukung oleh jurnal penelitian terdahulu, Endang Widayanti (2010) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus Kabupaten Sragen)”, Studi Kasus Kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) secara signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset.

Aras Aira (2014) dalam penelitiannya tentang “Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah”, menyimpulkan bahwa Manajemen aset memiliki peran memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan, pengendalian, mengidentifikasi potensi ekonomi daerah sehingga memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah, sebagai dasar optimalisasi pendapatan, dasar dalam memperbaiki organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatan pelayanan publik dan kemandirian dan pendanaan/ pembiayaan pembangunan daerah, landasan untuk merespon perubahan dan pertumbuhan daerah dalam perspektif otonomi daerah regional-global dalam suasana persaingan pasar yang dinamis dan global,

landasan untuk meningkatkan dan menciptakan citra (*image*) baru dan pemasaran daerah di mata pasar terbuka, dan landasan untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi dan mendorong efek berantai dari investasi itu pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Stanly C.F Tukunang (2016) dalam penelitiannya “Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro”. Hasil penelitian yaitu manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah.

Dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh aset perlu melakukan perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, perubahan/rejuvenasi aset, penghapusan aset, pengalihan aset atau pemusnahan aset. Setiap fungsi dari manajemen aset memerlukan keputusan biaya dan risiko (*costs and risk*). Oleh karena itu, perhitungan dan pertimbangan faktor biaya serta risiko melekat pada setiap fungsinya.

Penerapan dari berbagai fungsi tersebut diharapkan dapat membantu koperasi dalam melakukan pengelolaan aset yang dimiliki sehingga anggota dapat merasakan manfaat dari pengelolaan aset tersebut. Aset tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional koperasi ataupun sebagai salah satu usaha koperasi untuk menghasilkan pendapatan bagi koperasi.

Dalam tahun 2017, KPBS Pangalengan telah melakukan banyak perubahan salah satunya penambahan jumlah *Milk Collection Point*. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan pelayanan kepada anggota dengan terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dengan badan usaha lain. Maka dari itu, pengawasan terhadap implementasi manajemen aset untuk mengatur sumber daya yang dimiliki koperasi termasuk mengoptimalkan dan memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya sangatlah diperlukan.

Aset tetap yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal mampu menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, peningkatan keuntungan dan manfaat yang dirasakan anggota akan meningkatkan partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi keberlangsungan usaha koperasi.

Keunggulan KPBS Pangalengan dalam bersaing bisa dilihat dari jumlah omset & SHU yang diperoleh dalam 5 tahun terakhir, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Perolehan Omset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPBS Pangalengan

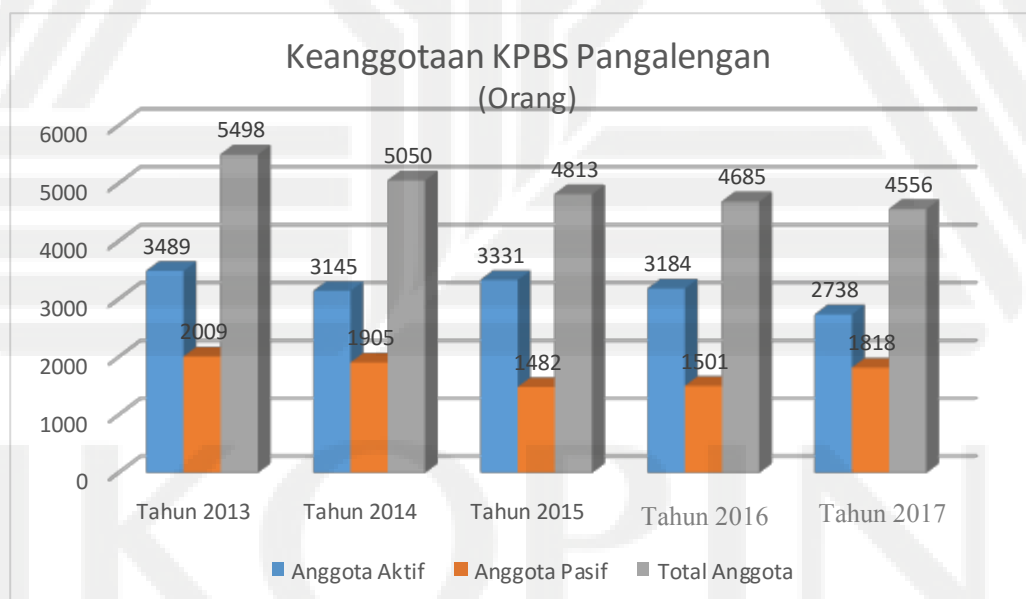
Tahun Buku	Omset	Sisa Hasil Usaha	Sisa Hasil Usaha Bagian Anggota
2013	Rp. 207.112.325.075,00	Rp. 1.157.303.058,13	Rp. 810.112.140,69
2014	Rp. 209.260.719.453,59	Rp. 1.224.399.686,42	Rp. 857.079.780,49
2015	Rp. 229.114.875.045,00	Rp. 1.265.977.984,41	Rp. 886.184.589,09
2016	Rp. 243.689.668.281,29	Rp. 1.377.718.687,60	Rp. 964.403.081,32
2017	Rp. 263.449.452.198,50	Rp. 1.544.575.967,78	Rp. 1.081.203.177,45

Sumber : Laporan RAT KPBS Pangalengan tahun buku 2013 – 2017

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah perolehan omset koperasi senantiasa mengalami peningkatan, peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun buku 2014 ke tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 19.854.155.591,41 atau 9,49%. Adapun dengan SHU Koperasi yang mengalami peningkatan, dan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun buku 2016 ke tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp. 166.857.280,18 atau sebesar 12,1%.

Peningkatan jumlah aset tetap berbanding sejajar dengan peningkatan jumlah omset yang diperoleh koperasi. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, usaha koperasi tidak bisa lepas dari peran anggota selaku pemilik dan pengguna koperasi.

Berikut jumlah anggota KPBS Pangalengan dalam 5 tahun terakhir disajikan grafik dibawah ini :



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Anggota KPBS Pangalengan 2013 –2017

Sumber : Laporan RAT KPBS Pangalengan

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa Keanggotaan KPBS Pangalengan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah anggota dari tahun buku 2013 ke tahun buku 2014 mengalami penurunan paling signifikan sebanyak 448 orang atau 8,15%, sedangkan anggota aktif mengalami penurunan paling signifikan dari tahun buku 2016 ke 2017 yaitu sebanyak 446 orang atau jika dalam prosentase adalah sebesar 14,01%. Penurunan jumlah anggota KPBS Pangalengan dilatarbelakangi berbagai faktor diantaranya ada anggota yang meninggal dunia dan faktor lainnya.

Peningkatan anggota maupun tingkat perputaran keuangan koperasi berasal dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada anggota. Peran karyawan koperasi dalam pelaksanaan yang baik, tutur kata yang sopan, keandalan pelayanan dan ketanggapan terhadap keluhan anggota menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat menjadi anggota.

Seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan koperasi yang semakin dinamis, daya tarik manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang mendasarkan pada efisiensi biaya saja sebagai faktor daya saingnya ternyata tidaklah cukup. Sebagai seperangkat sistem kelembagaan yang menjadi landasan perekonomian kita, koperasi diharapkan selalu berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan lingkungan. Dinamika itulah yang mengundang lahirnya beraneka pola pikir peningkatan daya saing koperasi. Koperasi tidak dapat menghindar dari persaingan, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global terlebih dengan telah ditandatanganinya *Asian China Free Trade Agreement* (ACFTA) atau yang lainnya. Sebagai salah satu pilar ekonomi yang keberadaannya di

dukung Undang-Undang Republik Indonesia, koperasi dituntut mampu memberikan kontribusinya yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi kerakyatan.

Sudah saatnya koperasi harus memikirkan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saingnya, tidak hanya mendasarkan pada efisiensi biaya saja, tetapi menciptakan diferensiasi-diferensiasi lain yang kompetitif. Koperasi dituntut dapat mengelaborasi dirinya untuk mengenali potensi dan kelemahannya, sehingga paling tidak dapat meningkatkan daya saingnya untuk dapat bertahan di tengah gempuran arus globalisasi yang tidak terbendung. Koperasi diharapkan dapat mengelola persaingan dengan kekhasannya melalui peningkatan daya saing tanpa meninggalkan jatidirinya.

Dengan perubahan bisnis yang begitu cepat serta selera dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, sudah seharusnya para pengurus dan pengelola koperasi meningkatkan kemampuan koperasinya. Perkembangan koperasi haruslah selaras dengan zaman agar mampu bersaing di era persaingan global ini. Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia bisnis. Pasar menjadi luas dan peluang usaha dimana-mana. Untuk memenangkan persaingan, koperasi harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota dibandingkan para pesaing. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas koperasi adalah kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada anggotanya.

Pemberian pelayanan kepada anggota bisa didukung dengan beberapa faktor salah satunya adalah dengan sarana prasarana yang mendukung.

Sebagaimana dinyatakan dalam “Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan, yakni infrastruktur termasuk ke dalam faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing melalui manajemen aset.

Menurut Porter dalam Manajemen Pemasaran Djaslim (2002:10), mengemukakan rantai nilai sebagai alat utama dalam mengidentifikasi sumber-sumber potensial peningkatan nilai, yaitu : Kegiatan Utama (Logistik Masuk, Operasi, Logistik Keluar, Pemasaran dan Penjualan, Pelayanan) dan Kegiatan Pendukungnya yaitu, (Infrastruktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengembangan Teknologi, Pengadaan Barang/Jasa). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan infrastruktur termasuk ke dalam faktor yang bisa meningkatkan nilai koperasi dan sebagai daya saing koperasi. Oleh sebab itu pengelolaan aset menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan guna peningkatan pelayanan dan manfaat ekonomi bagi anggota koperasi sebagai modal untuk bersaing dengan para pesaing lainnya.

Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan koperasi dalam membiayai pembangunan koperasi yang tercermin dalam pendapatan koperasi, serta menjadi salah satu elemen penting agar prinsip koperasi yaitu “Kemandirian” juga bisa dilaksanakan.

Kemandirian koperasi yang siap menghadapi segala keadaan itu ialah tanpa mengurangi derajat dari mutu pelayanan kepada para anggotanya dan

masyarakat umum dalam lingkup kerjanya, serta ratio keuangannya dan ratio aktivitasnya tidak berada dibawah standar yang telah ditetapkan.

Keberhasilan koperasi akan terlihat nyata apabila pengelolaan koperasi dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada prinsip jatidiri koperasi dan berkemampuan daya saing. Hal ini sesuai dengan rekomendasi ICA ROAP (*International Co-operative Alliance, Regional Office for Asia and the Pacific*) pada konferensi Menteri-menteri Koperasi Asia-Pasifik di Kathmandu bulan April 2002. Prinsip jatidiri merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Kemampuan daya saing mempunyai makna bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, otonomi, swadaya, berkehendak untuk mengelola diri sendiri sehingga mampu beroperasi dan berhasil bersaing dalam ekonomi pasar. Dengan prinsip jatidiri koperasi dan daya saing, koperasi akan berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan.

Jika kebutuhan anggota sudah terpenuhi, maka koperasi bisa melakukan pelayanan terhadap non anggota atau masyarakat luas guna menambah manfaat ekonomi untuk anggota yakni pendapatan Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan fenomena serta penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menguraikan pertanyaan – pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi manajemen aset pada Koperasi Perternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.
2. Bagaimana dampak manajemen aset dilihat berdasarkan manfaat ekonomi anggota Koperasi Perternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.
3. Bagaimana daya saing Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan dengan pada pesaing tanpa menghilangkan jatidiri koperasi menggunakan ICA GRID.
4. Bagaimana Upaya Koperasi Perternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan dalam pengelolaan manajemen aset untuk meningkatkan daya saing.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui inplementasi manajemen aset dalam upaya meningkatkan daya saing Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Implementasi manajemen aset pada Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.
2. Dampak manajemen aset dilihat berdasarkan manfaat ekonomi anggota Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.
3. Pengukuran daya saing Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan berdasarkan ICA GRID.
4. Upaya yang harus dilakukan agar manajemen aset dapat dikelola dan meningkatkan daya saing Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai manajemen keuangan khususnya yang berhubungan dengan konsep manajemen aset dan kaitannya dengan daya saing.

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun implementasinya dalam rangka menambah pengetahuan.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi penelitian dimasa mendatang.

1.4.2 Aspek Praktis

Bagi Koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dimasa mendatang.



IKOPIN